

**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN
SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**Nama : SIWI NURSUSANTI
N.P.M : 0606008752**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

THE LEGAL FORCE OF SETTLEMENT AGREEMENT
AS THE BASIS FOR THE EXECUTION OF COURT DECISION

THESIS

Submitted of Fullfill the Requirement of Obtaining
Master of Notary

By

SIWI NURSUSANTI

NPM : 0606008752



University of Indonesia
Faculty of Law
Master Program of Notary
Depok, July 2008

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN
SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Oleh :

Nama : SIWI NURSUSANTI
N.P.M : 0606008752

Pembimbing

SRI MAMUDJI, S.H., M.Law Lib.



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008

**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN
SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN**

TESIS

Diajukan dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Tanggal 22 Juli 2008

Pembimbing Tesis

**Ketua Program Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Indonesia**

SRI MAMUDJI, S.H., M. Law Lib. FARIDA PRIHATINI, S.H., M.H., C.N.



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : SIWI NURSUSANTI.
NPM : 0 6 0 6 0 0 8 7 5 2.
Program Studi : Magister Kenotariatan.
Judul : Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian sebagai
Dasar Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persayaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : **SRI MAMUDJI, S.H., M. Law Lib.** (.....)

Penguji : **FARIDA PRIHATINI, S.H., H.H., C.N.** (.....)

Penguji : **LITA ARIJATI, S.H., LL. M.** (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 22 JULI 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : SIWI NURSUSANTI

N P M : 0606008752

Tanda Tangan :

Tanggal : 22 JULI 2008

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SIWI NURSUSANTI.
NPM : 0606008752.
Program Studi : Magister Kenotariatan.
Fakultas : Hukum.
Jenis Karya : T e s i s.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN SEBAGAI DASAR
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN.**

besera perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : JAKARTA.
Pada tanggal : 22 JULI 2008.

Yang menyatakan,

(SIWI NURSUSANTI)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Hukum (Tesis) dengan Judul Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian sebagai Dasar Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Tesis ini disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar strata-2(S-2) Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari tesis ini jauh dari sempurna dan banyak kekurangan mengingat kemampuan penulis yang terbatas, oleh karena itu kritik dan saran guna kesempurnaan perbaikan penulisan hukum ini sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak diantaranya :

1. **Ibu SRI MAMUDJI, S.H., M.L.L.**, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, pengarahan dan bimbingan yang sangat berguna dalam penulisan tesis ini.
2. **Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N.**, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Suami (**H. Zainuddin, S.E**), anak (**Ichwan Budiman, S.T., Hermawan Budiman dan Zsa zsa Intan Pratiwi**), cucu (**Syifa Qat'runada, Muhammad Rassya Kharisma**), yang penuh pengertian dan perhatian memberikan semangat dan motivasi, serta seluruh keluarga, juga **para dosen di STIHS (SEKOLAH**

TINGGI ILMU HUKUM SULTAN ADAM) Banjarmasin Kalimantan Selatan.

4. **Bapak / Ibu** beserta **staf pengajar** Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. **Sahabat** terbaikku, **Mba Santun** yang selalu mengajak diskusi, **Reny** yang centil dan manja, **Gracia** yang polos dan **Nurli** yang lucu, juga **Mba Endah, Mas Widi, Bastriandi**, juga **Afin** serta **teman** dan **rekan-rekan** penulis yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungannya dan tak lupa **Semua pihak** yang membantu dalam penulisan tesis ini.

Akhir kata Penulis mohon maaf jika dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kesalahan, dan berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Ilmu Hukum, dan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Depok, Juli 2008

Penulis

ABSTRAK

Nama : SIWI NURSUSANTI.
 Program studi : Magister Kenotariatan.
 Judul : Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian
 sebagai Dasar Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Tesis ini membahas mengenai “Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Sebagai Dasar Pelaksanaan Putusan Pengadilan”. Kajian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dengan tipe penelitian eksplanatoris. Perjanjian perdamaian sebagaimana di rumuskan oleh Pasal 1851 KUH Perdata, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan/atau mengakhiri suatu perkara perdata di muka pengadilan. Dengan demikian, perjanjian perdamaian dapat dilakukan di luar pengadilan, atau di muka pengadilan. Perjanjian yang dilakukan di luar pengadilan, mempunyai kekuatan hukum vide Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, tidak boleh dibatalkan secara sepihak, dan dilaksanakan dengan itikad baik. Dan apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ke pengadilan agar perjanjian perdamaian dipenuhi dan/atau dibatalkan disertai atau tanpa disertai biaya, rugi dan bunga vide Pasal 1238, 1242, 1243 KUH Perdata. Apabila perjanjian perdamaian didaftarkan ke pengadilan sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka gugatan disertai permintaan putusan serta merta vide Pasal 180 HIR atau Pasal 191 RBg. Perjanjian perdamaian dapat dilakukan di muka pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Muka Pengadilan, dan apabila perjanjian perdamaian tersebut dikukuhkan melalui putusan pengadilan, maka mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) vide Pasal 1858 KUH Perdata. Apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menempuh prosedur eksekusi sebagaimana diatur Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 223 HIR atau Pasal 242 sampai Pasal 257 RBg. Kesimpulan yang dapat dikemukakan bahwa perjanjian perdamaian di luar pengadilan yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri dapat dijadikan dasar pelaksanaan putusan pengadilan serta merta atau *uit voerbaar bij voorraad*, dan perjanjian perdamaian yang dikukuhkan oleh pengadilan dapat dijadikan dasar pelaksanaan sama seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau *in kracht van gewijsde*.

Kata Kunci :
 Perjanjian, *Perjanjian Perdamaian*, *Kekuatan Hukum*.

ABSTRACT

Name : SIWI NURSUSANTI.
The Study Program : Master Program of Notary.
Title : The Legal Force of Settlement Agreement as thr Basis
For the Execution of Court Decision.

This thesis is written based on library. This Settlement Agreement as formulated by Article 1851 of Indonesia Civil Code, with the purpose to prevent the occurrence of dispute and/or to end a civil procedural case before the court. Therefore, Settlement Agreement can be made outside the court or before the court. Agreement made outside the court has legal force vide Article 1338 of the Indonesian Civil Code which is it will be validly effective as law for the makers, it cannot be unilaterally annulled, and it must be carried out in good faith. And if one of the parties commits a default, then, the injured party may file a lawsuit to the court in order that the Settlement Agreement is fulfilled and/or annulled supplemented by or without being supplemented by the obligation to bear the cost, to pay for compensation and interest vide Articles 1238, 1242, 1243 of the Indonesian Civil Code. If Settlement Agreement is registered to the court as stipulated by Article 6 Chapter (7) of Low Number 30 of the Year 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution, then, the lawsuit will be supplemented by a petition for the issuance of immediate decision vide Article 180 of HIR or Article 191 RBg. Settlement Agreement can be made before the court based on the provision of Article 130 HIR or Article 154 RBg. in conjunction with the Regulation of the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 02 of the Year 2003 regarding the Procedure for Mediation Before the Court, and if the Settlement Agreement is affirmed by means of court decision, then, it has the same legal force as court decision having permanent legal force (*in kracht van gewijsde*) vide Article 1858 of the Indonesian Civil Code. If one of the parties commits a default, then, the injured party may take the execution procedure as stipulated in Article 195 up to Article 208 and Article 224 of HIR or Article 206 up to Article 223 of HIR or Article 242 up to Article 257 of RBg. The conclusion which can be presented is that Settlement Agreement outside the court which is registered at the District Court can be used as the basis for the execution of immediate court decision or *uit voerbaar bij voorraad*, and Settlement Agreement affirmed by court can be used as the basis for the execution identical to court decision having permanent legal force or *in kracht van gewijsde*.

Key Words :
Agreement, Settlement Agreement.

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Halaman Pernyataan Orisinalitas
Halaman Pengesahan
Kata Pengantar	i
Abstrak	iii
Daftar	v
Bab I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan	7
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan	8
Bab II : PERJANJIAN PERDAMAIAN DAN PERMASALAHANNYA	10
A. Landasan Teoritis dan Yuridis mengenai Perjanjian Perdamaian	10
1. Pengertian dan Dasar hukum Perjanjian Perdamaian.....	10
2. Pengertian Sengketa dan Perkara serta Penyelesaiannya melalui Perjanjian Perdamaian.....	17
B. MASALAH DAN ANALISIS	33
1. Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian yang dilakukan oleh Pihak-pihak Bersengketa di Luar Pengadilan	38
2. Bagaimana Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian yang Dikukuhkan oleh Putusan Pengadilan.....	41
Bab III : PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
Daftar Pustaka	48